



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARGONO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 763912

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.250.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/140 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 355.000.000
3. Tanah Seluas 1.868 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 747 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 410.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **138.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX B6H AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **44.900.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **467.400.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.900.800.000

III. HUTANG

Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.850.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.